

PELANGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2023
 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

No.	Nomor Surat	Satker	Kode Satker	Tahun	Judul Pemeriksaan	Kode Temuan	Uraian Temuan	Kode Rekomendasi	Uraian Rekomendasi	Nilai Temuan	Status Tindak Lanjut	Deskripsi Tindak Lanjut	Alasan Ditolak	Tanggal Tindak Lanjut	Tanggal Terakhir Update
1	12620	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	677539	2023	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022	67	Pengelolaan Aset Tetap pada Kemendikbudristek Belum Sepenuhnya Memadai	3654	b. BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk menginstruksikan seluruh Pejabat Eselon I agar memerintahkan masing-masing KPA untuk melakukan identifikasi dan penatausahaan Aset Tetap secara cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.	0	Sesuai Rekomendasi	ISI Yogyakarta yang memiliki 33 buah sertipikat tanah yang 31 diantaranya belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Untuk 2 buah sertipikat sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dari 31 buah sertipikat terdapat 26 buah sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Bantul dan 5 buah sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sleman. Penggantian nama sertipikat tanah ISI Yogyakarta ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang terletak di Jl. Ringroad Timur, Manding, Tirirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Jl. Dr. Radjimin, Paten, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.	Hasil telaah di SIPTL : sesuai (Vita_21 Feb 2024)	2023-10-25 09:33:31	2024-02-21 08:57:06

10	8450	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	677539	2021	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020	27	Pengelolaan Aset Tetap dalam Neraca Tahun 2020 pada Kemendikbud Belum Sepenuhnya Memadai	3406	BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar meningkatkan pengelolaan BMN sebagai berikut: Pimpinan Eselon-1 dan pimpinan satker di lingkungan Kemendikbudristek untuk melakukan verifikasi dan validasi atas pencatatan nilai wajar BMN sesuai hasil revaluasi BMN	0	Sesuai Rekomendasi	TINDAKAN DARI PUSAT	Berdasarkan data di SIPTL per 12 Juni 2025, status rekomendasi telah sesuai.	2025-06-12 05:24:38	2025-06-12 05:24:38
11	8516	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	677539	2021	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020	27	Pengelolaan Aset Tetap dalam Neraca Tahun 2020 pada Kemendikbud Belum Sepenuhnya Memadai	3411	BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar meningkatkan pengelolaan BMN sebagai berikut: Pimpinan Eselon-1 dan pimpinan satker di lingkungan Kemendikbudristek untuk melakukan verifikasi dan validasi atas: Jumlah dan nilai BMN yang dilakukan migrasi dan likuidasi pada Neraca per 31 Desember 2020	0	Sesuai Rekomendasi	TINDAKAN DARI PUSAT	Berdasarkan data di SIPTL per 12 Juni 2025, status rekomendasi telah sesuai.	2025-06-12 04:51:46	2025-06-12 04:51:46
12	8037	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	677539	2021	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020	1	Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud Belum Seragam	3302	BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar memerintahkan Dirjen Dikti menginstruksikan seluruh Rektor PTN menginstruksikan Kepala SPI masing-masing PTN berkoordinasi dengan Itjen dalam melakukan revaluasi penyusutan UK secara menyeluruh mendatang	0	Belum Sesuai Rekomendasi	Surat dijen dikti nomor: 0638/E/WS.00.02/2021 tanggal 7 September 2021, Surat Rektor ISI Yogyakarta Nomor: 3300/IT4/KU/2021 tanggal 28 September 2021, surat Ketua SPI ISI Yogyakarta Nomor: 3764/IT4.6.1/WS/2021 tanggal 29 Oktober 2021	Belum ada bukti koordinasi SPI dengan Itjen	2022-02-17 12:49:21	2024-10-22 12:41:45
13	8101	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	677539	2021	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020	1	Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud Belum Seragam	3303	BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar memerintahkan Dirjen Dikti menginstruksikan seluruh Rektor PTN menginstruksikan Kepala SPI masing-masing PTN berkoordinasi dengan Itjen dalam melakukan verifikasi atas piutang-piutang yang berasal dari mahasiswa vakum s.d. tahun 2020	0	Sesuai Rekomendasi	Surat Dirjen Dikti Nomor: 0628/E/WS.00.02/2021 tanggal 7 September 2021, Surat Rektor ISI Yogyakarta Nomor: 3301/IT4/KU/2021, Surat Ketua SPI ISI Yogyakarta Nomor: 3765/IT4.6.1/WS/2021 tanggal 29 Oktober 2021	Berdasar SIPTL per 26 Feb 2024, status: sesuai (vita)	2022-02-17 12:55:25	2024-02-26 10:49:56
14	7973	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	677539	2021	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020	1	Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud Belum Seragam	3301	BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar memerintahkan Dirjen Dikti menginstruksikan seluruh Rektor PTN agar dalam menyusun kebijakan akuntansi selaras dengan peraturan Kemendikbud dan sebelum kebijakan akuntansi ditetapkan oleh Rektor terlebih dahulu direviu oleh Sekretaris Dirjen Dikti	0	Belum Sesuai Rekomendasi	Surat dari Rektor kepada Penanggungjawab Akuntansi ISI Yogyakarta terkait dengan temuan atas kebijakan akuntansi	agar menyampaikan draft kebijakan akuntansi yang berlaku di internal PTN, dan dikirimkan untuk direviu oleh Setditjen Dikti	2022-07-15 13:04:11	2025-07-11 04:18:21